

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI STRATEGI MENGHADAPI AEC

Sisca May Retta Siahaan
siahaansisca@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the influence of independent commissioner, the frequency of meeting of board of commissioner, the audit committee size, the frequency of meeting of audit committee, institutional ownership, government ownership and foreign ownership to the intellectual capital disclosure on the companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. The samples have been selected by using purposive sampling technique and 21 banking companies which have published their annual report in 2010-2014 periods have been selected as samples, so there are 105 firm years that meet the criteria of the sample. The statistical method uses multiple regressions analysis, goodness of fit test / F test with 0.00 significance value or models which have been used in this research have met the fit criteria, the determination coefficient test with Adjusted R Square value (Adjusted R²) is 0.477 or 47.7%, all independent variables can explain the dependent variable, and partial test (t-test). This research has been processed by using SPSS version 16. It has been found from the result of the research that the frequency of meeting of board of commissioner, the frequency of meeting of audit committee, institutional ownership, government ownership and foreign ownership have significant and positive influence to the intellectual capital disclosure whereas the proportion of independent commissioner and the audit committee size do not have any influence to the intellectual capital disclosure.

Keywords: Good Corporate Governance, Ownership Structure, Intellectual Capital Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap 21 perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2010–2014, sehingga terdapat 105 *firm year* yang memenuhi kriteria sampel. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), uji *goodness of fit*/uji F dengan nilai signifikansi 0,00 atau model yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria *fit*, uji koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) 0,477 atau 47,7% seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, dan uji parsial (t-Test). Penelitian ini diolah dengan SPSS versi 16. Hasil penelitian menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*, sedangkan proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*,

Kata kunci: Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Pengungkapan *Intellectual Capital*

PENDAHULUAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara, yakni: Thailand, Filipina, Singapore, Malaysia, dan Indonesia. Tujuan dari pembentukan ASEAN adalah menjalin kerjasama yang berorientasi politik untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Seiring perjalanannya ASEAN berubah menjadi kerjasama regional dengan memperkuat semangat stabilitas bidang ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya tanpa mengabaikan kesetaraan dan kemitraan untuk terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera. Bersatunya kawasan Asia Tenggara merupakan cita-cita didirikannya ASEAN sehingga keanggotaannya mengalami perluasan menjadi sepuluh negara anggota, yaitu: Thailand, Filipina, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja (1999).

Kebijakan liberalisasi maupun kesepakatan integrasi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Atas dasar keyakinan tersebut dan untuk memperkuat daya saing kawasan dan kompetisi global dan regional, negara-negara ASEAN telah bersepakat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan proses integrasi di antara mereka dengan membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2020. Namun, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China-India.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat disebut sedang di ambang resesi, dengan indikatornya antara lain: nilai tukar rupiah yang terus melemah, daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Namun, Indonesia tidak boleh pesimis, karena pembentukan AEC akan memberikan beberapa tantangan dan peluang yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi juga dalam persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN yaitu China dan India karena Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dilihat dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Hal ini juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Semakin terintegrasinya ekonomi di kawasan ASEAN dan kemudahan dalam pergerakan dan perpindahan tenaga kerja akan menambah peluang kerja secara lebih luas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang masih tinggi, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penerimaan devisa di tengah ketatnya persaingan usaha dalam suasana perekonomian yang semakin terintegrasi.

Perusahaan kini harus mengubah strategi bisnisnya dari bisnis berdasarkan tenaga kerja (*labor based business*) ke bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Perusahaan yang berbasis pengetahuan menerapkan konsep manajemen pengetahuan yang bertugas mencari informasi mengenai bagaimana cara memilih, mengelola, dan memnfaatkan sumber daya agar efisien. Perhatian khusus perusahaan terhadap *intellectual capital* menjadi solusi tepat untuk menjawab masalah tersebut. *Intellectual capital* adalah sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.

Praktik pengungkapan *intellectual capital* merupakan konsekuensi dari implementasi *good corporate governance* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan menjalin kerjasama yang aktif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan manfaat yakni dapat memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah apakah proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk menguji secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen sebagai pengelola perusahaan (*agent*). Munculnya masalah keagenan karena *principal* tidak memainkan perannya secara langsung dalam menjalankan bisnisnya namun mendelegasikannya kepada *agent* sehingga *principal* hanya memiliki sebagian atau lebih sedikit informasi dibandingkan *agent*. Kondisi tersebut berpotensi memicu kecurangan pihak *agent* untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Hal ini didukung oleh Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi dasar, yaitu: (1) Manusia mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan daya pikir mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*), dan selalu menghindari resiko (*risk adverse*), (2) Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta asimetri informasi antara pihak *principal* dengan *agent*. (3) Perusahaan menganggap informasi sebagai komoditi yang diperjualbelikan sehingga kualitas pengungkapan informasi pun terpengaruh. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sedangkan, pihak *principal* memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi secara rinci karena tidak memahami kondisi internal perusahaan. Untuk memperoleh informasi, pihak *principal* hanya terbatas pada laporan tahunan yang disajikan oleh manajemen perusahaan (*agent*).

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh *principal* untuk dapat menjamin pihak *agent* akan membuat keputusan yang optimal, salah satunya adalah dengan pemberian insentif yang cukup (Jensen dan Meckling, 1976). Insentif dapat berupa opsi saham, bonus, besarnya insentif sangat tergantung pada tingkat besar pihak manajemen dapat memenuhi kepentingan pemilik, pemberian fasilitas lainnya seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Namun, upaya-upaya tersebut menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Upaya lain yang dapat dilakukan *principal* untuk menekan masalah keagenan adalah dengan menerapkan pengawasan melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja *agent* dan menjamin akuntabilitas *agent* terhadap *principal* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para *principal* bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan, sehingga dapat menjadi solusi atas masalah keagenan tersebut.

Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* menjelaskan memelihara hubungan yang mencakup semua bentuk hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dianggap memiliki posisi yang *powerful*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangannya. Dalam pandangan teori ini, *stakeholders* memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka terlepas nanti akhirnya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, akuntabilitas organisasi tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan saja, sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan informasi lebih dari yang diharuskan (*mandatory disclosure*), yakni pengungkapan mengenai *intellectual capital*.

Implementasi pengungkapan *intellectual capital* dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* terkait bagaimana perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan untuk menggunakan *intellectual capital* yang dimiliki dengan baik dalam pengelolaan bisnisnya, serta dapat meminimalisir potensi kecurangan yang ada. Manfaat yang didapatkan oleh *stakeholders* adalah informasi yang relevan, sehingga hubungan bisnis antara perusahaan dan *stakeholders* dapat terjalin dengan baik, nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan pun meningkat.

Intellectual Capital

Perhatian perusahaan akan pengelolaan *intellectual capital* beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa *intellectual capital* adalah landasan bagi perusahaan untuk berkembang dan memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. *Intellectual capital* harus diakui sebagai faktor yang cukup penting dalam terciptanya nilai yang mendasari era ekonomi baru. Terdapat banyak perbedaan definisi terkait *intellectual capital*. Bukh *et al* (2003) menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses dan teknologi yang dapat digunakan perusahaan dalam menciptakan nilai. Sawarjuwono dan Kadir (2003) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen organisasi (*human capital, structural capital, dan relational capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan kompetitif perusahaan.

Pengungkapan Intellectual Capital

Pengungkapan *intellectual capital* atau *intellectual capital disclosure* (ICD) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan informasi yang bernilai bagi para *investor* karena dapat membantu mereka dalam mengurangi ketidakpastian akan prospek masa depan serta dapat memudahkan dalam menilai perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memberikan bukti kepada khalayak publik tentang nilai perusahaan mereka yang sebenarnya dan kemampuan menciptakan kekayaan mereka sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Bruggen *et al*, 2009). Pengungkapan *intellectual capital* yang tinggi diharapkan mampu memberi pengawasan yang lebih intensif bagi perusahaan untuk mengurangi perilaku manajer yang oportunistik dan timbulnya asimetri informasi (Li *et al*, 2008).

Kerangka modal intelektual (*intellectual capital framework*) yang digunakan untuk mengidentifikasi pengungkapan *intellectual capital* dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian Uzliawati *et al*, 2014.

Tabel 1
Intellectual Capital Framework

<i>Internal Capital (Structural Capital)</i>	<i>External Capital (Customer Capital)</i>	<i>Employee Competence (Human Capital)</i>
<i>Intellectual Property:</i>	a. <i>Brands</i>	a. <i>Know-how</i>
a. <i>Patents</i>	b. <i>Customers</i>	b. <i>Education</i>
b. <i>Copyrights</i>	c. <i>Customers loyalty</i>	c. <i>Vocational qualification</i>
c. <i>Trademarks</i>	d. <i>Company names</i>	d. <i>Work-related knowledge</i>
<i>Infrastructure Asset:</i>	e. <i>Distribution channels</i>	e. <i>Work-related competence</i>
d. <i>Management philosophy</i>	f. <i>Business collaborations</i>	f. <i>Entrepreneurial spirit</i>
e. <i>Corporate culture</i>	g. <i>Favourable contracts</i>	
f. <i>Management process</i>	h. <i>Financial contracts</i>	
g. <i>Information system</i>	i. <i>Licensing agreements</i>	
h. <i>Networking system</i>	j. <i>Franchising agreements</i>	
i. <i>Research projects</i>		

Sumber: Uzliawati *et al* (2014)

Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Menurut Munawir (2002) pada umumnya ada tiga bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan pertumbuhan modal.

Lima azas *corporate governance* yang harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis korporasi, yaitu: (1). Transparansi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. (2). Akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan saham, dan pemangku kepentingan lainnya. (3). Responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. (4). Independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. (5). Kewajaran, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam konteks pengendalian dikenal adanya mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal *corporate governance* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, komite-komite di bawah dewan, dan pertemuan-pertemuan dewan dan komite. Mekanisme eksternal *corporate governance* tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, dan peran pemegang saham lainnya. Jika perusahaan menerapkan mekanisme *good corporate governance* (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1). Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian

wewenang kepada pihak manajemen. (2). Mengurangi biaya modal. (3). Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. (4). Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Perumusan Hipotesis

Hubungan Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *intellectual capital*

Pasal 8 PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum mengatur bahwa perseroan harus memiliki komisaris independen dengan komposisi sedikitnya 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Li *et al* (2008) mempertimbangkan komposisi dewan sebagai kemungkinan faktor penentu dari pengungkapan sukarela, karena komisaris independen adalah posisi yang tepat dalam mengawasi kinerja manajemen, sehingga semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan menentukan luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan termasuk mengenai *intellectual capital*. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis yang akan dikembangkan adalah:

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Rapat dewan komisaris dilakukan guna mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dalam rapat dewan komisaris ini juga membahas efektivitas mekanisme pengawasan yang telah dijalankan dan yang akan dijalankan. Frekuensi rapat dewan komisaris yang sering dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif, dan dapat memberi daya dorong bagi manajemen dalam mengungkapkan informasi terkait *intellectual capital* secara luas dan relevan karena merasa diawasi. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₂: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Komite audit membuat interaksi antara dewan komisaris dengan auditor internal lebih efektif. Komite audit juga berperan dalam memastikan proses yang berkaitan dengan pengungkapan keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komite audit berwenang untuk mengakses informasi mengenai karyawan, aset, dan sumber daya lainnya terkait dengan tugasnya, sehingga dapat meminimalkan *agency cost* yang ada. Keberadaan komite audit adalah mekanisme terbaik untuk meningkatkan pengungkapan *intellectual capital*, memperbaiki pengendalian internal, juga menambah kualitas informasi yang diungkapkan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2008) menyatakan bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin luas pula pengungkapan *intellectual capital*. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Koordinasi dalam rapat komite audit membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal serta terhadap *good corporate governance*. Semakin seringnya frekuensi rapat komite audit dilakukan, maka dapat meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif sehingga dapat mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian Taliyang dan Jusop (2011) menemukan hubungan positif antara frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan mendapat pengawasan yang besar juga dari *investor*. Apabila kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tinggi, maka manajer akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* secara luas dengan maksud memberikan sinyal positif kepada *investor* institusional sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Pihak pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap mengenai sumber daya yang dimiliki. Pengungkapan *intellectual capital* menjadi sinyal bagi perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa perusahaan telah berupaya menaati kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Besarnya sorotan pemerintah dan masyarakat membuat perusahaan lebih transparan dalam manajemennya sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis keenam yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₆: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hubungan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Asimetri informasi lebih sering dihadapi oleh perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar, karena adanya keterbatasan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk mengungkapkannya informasinya secara luas dalam laporan tahunannya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki karyawan-karyawan dengan keahlian yang mumpuni, teknologi yang modern, dan jaringan informasi yang lebih luas, sehingga memungkinkan untuk menungkapkan informasi secara lebih luas dan lebih baik. Sehubungan uraian di atas, maka hipotesis ketujuh yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₇: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014 dengan jumlah 105 *firm year*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1). Terdaftar sebagai perusahaan sektor perbankan selama tahun 2010-2014, (2). Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode tahun 2010-2014, (3). Perusahaan yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian, (4). Perusahaan yang datanya dapat diakses selama masa penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Pengungkapan *Intellectual Capital*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *intellectual capital* yang diukur dengan menggunakan angka index (ICD index). Prosentase dari index pengungkapan sebagai total dihitung menurut rumus sebagai berikut:

$$ICDI = (\sum_{i=1}^m di / M) \times 100\%$$

Dimana,

ICDI : Indeks pengungkapan intellectual capital (ICD index)

Di : nilai 1 jika item ditemukan, dan 0 jika item tidak ditemukan

M : total jumlah item yang diukur (25 item)

Variabel Independen

Proporsi Komisaris Independen (BCOMP)

Dewan komisaris adalah bentuk dari pengendalian internal yang berguna untuk mengatasi konflik kepentingan. Komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan. Komisaris independen harus bebas dari hubungan direksi, anggota dewan komisaris lain, pemegang saham, dan hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi keahliannya dalam mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih luas untuk menciptakan nilai yang relevan bagi *stakeholder*. Proporsi komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Taliyang dan Jusop (2011) sebagai berikut:

$$BCOMP(\%) = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (MC)

Rapat dewan komisaris dilakukan untuk pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Proses pengambilan keputusan ini adalah penting dalam menentukan efektifitas dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali. Frekuensi

rapat dewan komisaris dapat diukur dengan menghitung rapat dewan komisaris yang diselenggarakan dalam satu periode laporan tahunan.

Ukuran Komite Audit (SAC)

Komite audit adalah suatu bentuk pengawasan yang ada di bawah dewan komisaris. Tugas komite audit adalah mengawasi pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan. Ukuran komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit di dalam perusahaan.

Frekuensi Rapat Komite Audit (MAC)

Rapat komite audit berguna sebagai media koordinasi dalam pelaksanaan tugas membantu dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan. Frekuensi rapat komite audit dapat diukur dari menghitung rapat komite audit yang diselenggarakan dalam satu periode laporan tahunan. Pengukuran ini konsisten dengan penelitian Taliyang dan Jusop (2011).

Kepemilikan Institusional (INSTOWN)

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi, yaitu perusahaan swasta, perusahaan investasi, bank, LSM, perusahaan efek, atau instansi lain seperti dana pensiun. Kepemilikan institusional diukur dengan menghitung rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Khodadadi, *et al* (2010) sebagai berikut:

$$\text{INSTOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Pemerintah (GOVOWN)

Kepemilikan pemerintah adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah terkait. Kepemilikan pemerintah diukur dari persentase kepemilikan saham oleh lembaga pemerintah atas saham beredar.

$$\text{GOVOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Asing (FOROWN)

Kepemilikan asing adalah proporsi saham yang dimiliki oleh *investor* asing, yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah saham yang beredar.

$$\text{FOROWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor asing}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian regresi berganda. Pengujian regresi berganda dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi

linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Adapun model yang digunakan dari regresi linear berganda yaitu:

$$ICD = a + \beta_1 BCOMP + \beta_2 MC + \beta_3 SAC + \beta_4 MAC + \beta_5 INSTOWN + \beta_6 GOVOWN + \beta_7 FOROWN + e$$

Keterangan :

ICD = Pengungkapan *intellectual capital*

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien Regresi

BCOMP = Proporsi komisaris independen

MC = Frekuensi rapat dewan komisaris

SAC = Ukuran komite audit

MAC = Frekuensi rapat komite audit

INSTOWN = Kepemilikan institusional

GOVOWN = Kepemilikan Pemerintah

FOROWN = Kepemilikan asing

e = Standar error / tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Hasil dari analisis yang dihitung berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat ditentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila hasil dari analisis tersebut sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama turun atau searah, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah positif. Begitu juga sebaliknya, apabila kenaikan variabel independen menyebabkan penurunan variabel dependen maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah negatif.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan *goodness of fit* mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat grafik, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:57).

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:69).

Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi maka terjadi autokorelasi (Ghozali, 2006:61).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BCOMP	105	.33	.80	.5650	.09734
MC	105	3	57	16.30	14.406
SAC	105	2	8	4.18	1.299
MAC	105	2	46	14.75	9.597
INSTOWN	105	.00	100.00	20.4356	27.74232
GOVOWN	105	.00	75.00	12.5788	24.88175
FOROWN	105	.00	97.29	33.6851	36.58626
ICD	105	.32	.72	.5882	.09937
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 data. Variabel ICD (Pengungkapan *Intellectual Capital*) memiliki nilai minimum sebesar 0,32. ICD maksimum memiliki nilai sebesar 0,72. Dari nilai minimum dan maksimum ICD tersebut maka rata-rata hitung (*mean*) diperoleh sebesar 58,82.

Variabel BCOMP (Proporsi Komisaris Independen) memiliki nilai minimum sebesar 0,33. BCOMP maksimum memiliki nilai sebesar 0,80. Dari nilai minimum dan maksimum BCOMP menghasilkan nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 56,50. Variabel MC (Frekuensi Rapat Dewan Komisaris) memiliki nilai minimum sebesar 3. MC maksimum memiliki nilai sebesar 57. Dari nilai minimum dan maksimum MC menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 16,30. Variabel SAC (Ukuran Komite Audit) memiliki nilai minimum sebesar 2. SAC maksimum memiliki nilai sebesar 8. Dari nilai minimum dan maksimum SAC menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 4,18. Variabel MAC (Frekuensi Rapat Komite Audit) memiliki nilai minimum sebesar 2. MAC maksimum memiliki nilai sebesar 46. Dari nilai minimum dan maksimum MAC menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 14,75. Variabel INSTOWN (Kepemilikan Institusional) memiliki nilai minimum sebesar 0,00. INSTOWN maksimum memiliki nilai sebesar 100. Dari nilai minimum dan maksimum OIL menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 20,43. Variabel GOVOWN (Kepemilikan Pemerintah) memiliki nilai minimum sebesar 0,00. GOVOWN maksimum memiliki nilai sebesar 75,00. Dari nilai minimum dan maksimum GOVOWN menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 12,57. Variabel FOROWN (Kepemilikan Asing) memiliki nilai minimum sebesar 0,00. FOROWN maksimum memiliki nilai sebesar 97,29. Dari nilai minimum dan maksimum NIW menghasilkan rata-rata hitung (*mean*) sebesar 33,68.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik *probabilty plot* menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal dengan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih di sekitar garis normal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas. Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik *scatterplot*. Hasil dari grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik tidak terlalu menyebar dan tampak seperti membentuk sebuah pola, maka dilakukan uji glejser untuk memberikan kepastian bahwa model yang dibangun bebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser menyatakan bahwa nilai signifikan dari tujuh variabel (proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing) lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa tujuh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson hitung sebesar 1,877. Penelitian ini menggunakan data sejumlah 105 dan variabel independen sebanyak 7 sehingga berdasarkan tabel Durbin Watson diketahui nilai $dl = 1,56336$ dan $du = 1,80419$ (pada tabel DW), serta nilai $(4-du) = 2,19581$. Nilai 1,877 tersebut terletak diantara nilai $du (1,80419)$ dan $4-du (2,19581)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

Analisis Regresi Linier

Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh rekapitulasi analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.371	.070		5.307	.000
	BCOMP	-.031	.081	-.030	-.379	.706
	MC	.002	.001	.255	2.803	.006
	SAC	.013	.007	.164	1.714	.090
	MAC	.003	.001	.278	3.071	.003
	INSTOWN	.001	.000	.414	3.644	.000
	GOVOWN	.002	.001	.463	3.134	.002
	FOROWN	.002	.000	.629	5.140	.000

a. Dependent Variable: ICD
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \text{BCOMP} + \beta_2 \text{MC} + \beta_3 \text{SAC} + \beta_4 \text{MAC} + \beta_5 \text{INSTOWN} + \beta_6 \text{GOVOWN} + \beta_7 \text{FOROWN} + e$$

$$\text{ICD} = 0,371 - 0,031 \text{BCOMP} + 0,002 \text{MC} + 0,013 \text{SAC} + 0,003 \text{MAC} + 0,001 \text{INSTOWN} + 0,002 \text{GOVOWN} + 0,002 \text{FOROWN} + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji *goodness of fit*

Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui kelayakan model, apakah model yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji *goodness of fit* disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Uji *goodness of fit*

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.526	7	.075	14.525	.000 ^a
	Residual	.501	97	.005		
	Total	1.027	104			

a. Dependent Variable: ICD

b. Predictors: (Constant), BCOMP, MC, SAC, MAC, INSTOWN, GOVOWN, FOROWN

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 14.525 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun, yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap pngungkapan *intellectual capital* memenuhi kriteria fit (sesuai).

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Uji ini mengidentifikasi apakah proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil uji t yang disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.371	.070		5.307	.000
	BCOMP	-.031	.081	-.030	-.379	.706
	MC	.002	.001	.255	2.803	.006
	SAC	.013	.007	.164	1.714	.090
	MAC	.003	.001	.278	3.071	.003
	INSTOWN	.001	.000	.414	3.644	.000
	GOVOWN	.002	.001	.463	3.134	.002
	FOROWN	.002	.000	.629	5.140	.000

a. Dependent Variable: ICD
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat dalam tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen (BCOMP) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa proporsi komisaris independen (BCOMP) memiliki nilai t hitung sebesar -0,379 dan tingkat signifikansi sebesar 0,706. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Dengan demikian hipotesis satu (H₁) ditolak.

Hasil pengujian penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan Li *et al* (2008; 2012) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*, tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Taliyang dan Jusop (2011), juga Zulkarnaen dan Mahmud (2013) yang tidak menemukan pengaruh proporsi komisaris independen dengan pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini terjadi karena semakin besarnya proporsi komisaris independen akan membuat mekanisme pengawasan tidak efektif disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (MC) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki nilai regresi positif, nilai t hitung sebesar 2,803 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* diterima, karena rapat dewan komisaris adalah wadah yang tepat untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap aktivitas perusahaan.

Pengaruh Ukuran Komite Audit (SAC) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa ukuran komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 1,714 dan tingkat signifikansi sebesar 0,090. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* ditolak.

Hasil pengujian penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan Li *et al* (2008) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*, tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Taliyang dan Jusop (2011), juga Zulkarnaen dan Mahmud (2013) yang tidak menemukan pengaruh ukuran komite audit dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit (MAC) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 3,071 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* diterima.

Hasil penelitian ini senada dengan temuan penelitian Taliyang dan Jusop (2011) bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional (INSTOWN) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai kepemilikan institusional adalah 3,644 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* diterima.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah (GOVOWN) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai kepemilikan pemerintah adalah 3,134 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* diterima.

Pengaruh Kepemilikan Asing (FOROWN) terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai kepemilikan asing adalah 5,140 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sehingga hipotesis ketujuh (H_7) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.512	.477	.07190

a. Predictors: (Constant), BCOMP, MC, SAC, MAC, INSTOWN, GOVOWN, FOROWN

b. Dependent Variable: ICD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang terletak pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,477. Artinya sebesar 47,7% variabel independen yang terdiri dari proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan *intellectual capital*, sedangkan sisanya yaitu 52,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istanti (2009), Taliyang dan Jusop (2011). (2) Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini menyatakan rapat yang diadakan oleh dewan komisaris efektif dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan. (3) Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taliyang dan Jusop (2011), Uzliawati *et al* (2014). (4) Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2008; 2012), Taliyang dan Jusop (2011). (5) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh *et al* (2009). (6) Kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh *et al* (2009). (7) Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh *et al* (2009).

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* sebagai strategi menghadapi ASEAN Economic Community. Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan bagi

peneliti yang akan datang yaitu: (1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dengan periode pengamatan 2010-2014. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika memperluas obyek penelitian seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI serta memperpanjang periode pengamatan. Jumlah sampel yang lebih besar akan dapat menggeneralisasi semua jenis industri dan periode yang lebih lama akan memberikan hasil yang lebih valid atau hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. (2) Metode pengukuran *good corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran *good corporate governance* yang lebih menyeluruh seperti pengukuran yang digunakan oleh Wahidahwati (2012). (3) Metode pengukuran pengungkapan *intellectual capital* dalam penelitian ini menggunakan framework dari Sveiby (1997) yang terdiri dari 25 item pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran *intellectual capital* yang lebih luas seperti yang digunakan dalam penelitian Li *et al* (2008), Ulum (2009), dan Taliyang dan Jusop (2011). (4) Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh regulator untuk menetapkan standard yang jelas perihal pengungkapan *intellectual capital*, dan menjadikan sebagai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggen, A., P. Vergauwen, dan M. Dao. 2009. Determinant of Intellectual Capital Disclosure: Evidence from Australia. *Management Decision*. Vol. 47(2): 233-245
- Bukh, P. N. 2003. The Relevance of Intellectual Capital Disclosure: A Paradox?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 16(1): 49-56.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *The Academy of Management Review*. Vol. 5(1): 57-74.
- Ghozali, I. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Istanti, Sri Layla Wahyu. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)). *Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jensen, M., dan Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3: 82-137.
- Khodadadi, V., S. Khazami, dan A. Aflatooni. 2010. The Effect of Corporate Governance Structure on The Extent of Voluntary Disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*. Vol. 3(2): 151-164.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Li, J., R. Pike, dan R. Haniffa. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*. Vol. 38(2): 137-159.
- Li, J., R. Pike, dan M. Mangena. 2012. The Effect of Audit Committee Characteristics On Intellectual Capital Disclosure. *The British Accounting Review*. Vol. 44: 98-110.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Saleh, N. M., M. R. Rahman, dan M. S. Hasan. 2009. *Ownership Structure and Intellectual Capital Performance in Malaysia*.
- Sawarjuwono, T. dan A.P. Kadir. 2003. Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan

- Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5(1): 31-51.
- Sveiby, K. E. 1997. *The New Organisational Wealth*. Berret-Koehler Publishers Inc. San Fransisco CA.
- Taliyang, S. M., dan M. Jusop. 2011. Intelectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*. Vol. 6(12): 109-117.
- Ulum, I. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Uzliawati, L., D. Suhardjanto, dan K. Djati. 2014. The Characteristics of Audit Committee and Intellectual Capital Disclosure in Indonesia Banking Industry. *Journal on Business Review*. Vol. 3(2).
- Wahidahwati. 2012. The Influence of Financial Policies on Earnings Management, Moderated by Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 16(4): 507-523.
- Zulkarnaen, E. I., dan A. Mahmud. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 5(1): 79-85.

